

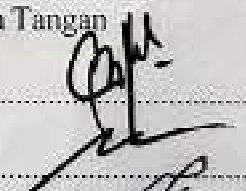


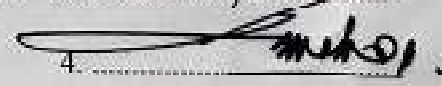

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA

Panitia Ujian Akhir Meja Hijau Program Studi Ekonomi Pembangunan, jenjang Program Strata Satu (S-1) Terakreditasi Berdasarkan SK BAN-PT No. 11920/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021, dengan ini menyatakan bahwa:

NAMA : YATATEMA ZAI
NPM : 20530018
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

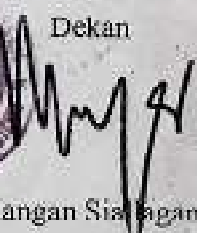
Telah mengikuti Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) pada Hari Jumat, 19 April 2024 dinyatakan LULUS.

Panitia Ujian,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Nancy Nopeline, S.E., M.Si.	1. 
2. Sekretaris	: Martin Luter Purba, S.E., M.Si.	2. 
3. Penguji Utama	: Dr. T. Sihol Nababan, S.E., M.Si.	3. 
4. Anggota Penguji	: Drs. Jusmer Sihotang, M.Si.	4. 
5. Pembela	: Martin Luter Purba, S.E., M.Si.	5. 



Dekan



(Dr. E. Hamonangan Siahaan, S.E., M.Si.)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui proses pembangunan di setiap daerah, akan berpotensi terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi yang menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengatasi kemiskinan yang ada di daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan dan menjadi fokus di negara manapun dalam mengatasinya. Karena tanpa adanya perhatian yang serius, maka masalah tingkat kemiskinan membuat proses pembangunan dan transformasi banyak mengalami hambatan dengan timbulnya konflik sosial ekonomi di lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, pengentasan kemiskinan ini sampai menjadi fokus utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam program *Sustainable Development Goals* (SDG's) periode 2015-2030, yang melibatkan partisipasi banyak anggota negara, termasuk Indonesia.

WHO (1948) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, air bersih, perumahan, dan layanan kesehatan. Seperti halnya WHO, World Bank (1990) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar hidup, sehingga membatasi kemampuan seseorang untuk mencapai potensi penuh mereka (BPS 2023).

Kuncoro dalam penelitian Itang (2015) menyatakan:

“secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas nya rendah. Selanjutnya, kemiskinan juga muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia yang rendah yang berarti produktivitas juga rendah dan upahnya pun rendah, terakhir ia menjelaskan bahwa kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan)”

Dari penyebab kemiskinan diatas, berdasarkan sudut pandang peneliti, dengan melihat realita sosial bahwa kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor tersebut banyak terjadi di wilayah pedesaan di Indonesia, dimana wilayah Pedesaan masih identik dengan kondisi keterbatasan. Lebih jelas dengan melihat perbedaan tingkat kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia periode tahun 2010–2023

Tahun	INDONESIA	
	Perkotaan	Pedesaan
	(%)	(%)
2010	9.87	16.56
2011	9.23	15.72
2012	8.6	14.7
2013	8.52	14.42
2014	8.16	13.76
2015	8.22	14.09
2016	7.73	13.96
2017	7.26	13.47
2018	6.89	13.1
2019	6.56	12.6
2020	7.88	13.2
2021	7.6	12.53

2022	7.53	12.36
2023	7.29	12.22

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023), Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah

Tabel 1.1 menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun periode 2010 hingga 2023. Selama periode tersebut persentase penduduk miskin perkotaan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Dimana, pada tahun 2010 persentase penduduk miskin perkotaan mencapai 9.87% sedangkan persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 16.56%. Tahun 2023, persentase penduduk miskin di perkotaan hanya sebesar 7.29% sedangkan di pedesaan sebesar 12.22%. Secara jumlah terjadi penurunan total persentase penduduk miskin di perkotaan dan di pedesaan. Dapat dilihat dari data dalam tabel 1.1 diatas, bahwa wilayah pedesaan masih rentan dengan penduduk miskin.

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) menjadi lokasi penanganan kemiskinan ekstrim oleh Pemerintah untuk mendorong masyarakat hidup mandiri secara ekonomi. Hal ini sesuai instruksi yang di sampaikan Pemerintah yang memerintahkan kepada para Kepala Sentra untuk memetakan potensi apa di daerah-daerah yang dianggap miskin itu, sehingga bisa di lakukan untuk perbaikan ekonominya (Anonim, 2023). Hal ini berarti, perlu perhatian khusus kepada daerah 3T untuk dapat mengatasi tantangan sebagai wilayah 3T.

Pemerintah menetapkan ada 62 daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal tahun 2020-2024. Dari 62 daerah tersebut, ada 4 daerah di Provinsi Sumatera Utara yang tergolong ke dalam daerah 3T, dan satu diantaranya adalah Kabupaten Nias Utara (Prasetya A, 2020). Ada 6 kriteria terkait penetapan daerah 3T berdasarkan Perpres no 63 tahun 2020 Tentang Penetapan daerah Tertinggal tahun 2020-2024, yakni : (a) perekonomian masyarakat; (b) sumber

daya manusia; (c) sarana dan prasarana; (d) kemampuan keuangan daerah; (e) aksesibilitas; dan (g) karakteristik daerah.

Nias Utara sebagai salah satu dari 33 kabupaten di Sumatera Utara yang tergolong muda dan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah desa terbanyak dari 11 kecamatan yang ada. Dan, tidak dapat dipungkiri bahwa Nias Utara menjadi peringkat kedua sebagai kabupaten termiskin di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan jumlah kemiskinan di Kabupaten Nias Utara dapat dilihat dalam gambar 1.1.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2023), Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota (diolah)

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Nias Utara 2010-2023

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Nias Utara cenderung menurun sepanjang tahun 2010-2023. Jumlah penduduk miskin Nias Utara pada tahun 2015 adalah jumlah penduduk miskin tertinggi dari periode yang ada yakni berjumlah 43.740 jiwa. Namun di tahun 2016 jumlah kemiskinan turun menjadi 41.660 jiwa sampai ditahun 2019 terus turun dengan jumlah kemiskinan 34.420 jiwa. Meskipun kembali naik di tahun 2019-2022, namun di tahun 2022, penduduk miskin kembali turun sebanyak 32.870 jiwa. Meskipun penurunannya cukup baik namun hal ini masih menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di

kabupaten Nias Utara masih cukup tinggi dimana jumlah populasi penduduk Nias Utara pada tahun 2022 yaitu sejumlah 150.780 orang. Artinya, Kabupaten Nias Utara juga masih hidup dalam kemiskinan.

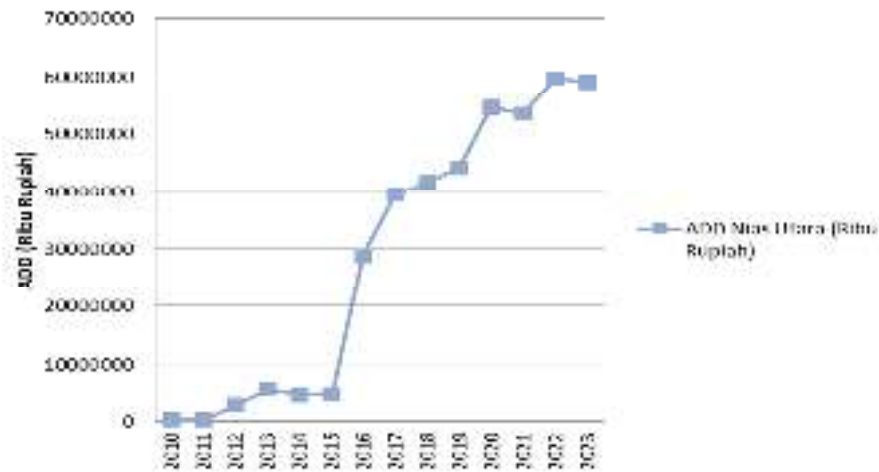
Salah satu kriteria penetapan daerah 3T yang perlu disorot adalah bagaimana kemampuan keuangan suatu daerah serta bagaimana pemanfaatan dan pengalokasian keuangan daerah tersebut. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (Kemendes PDT), menegaskan kepada seluruh desa di Indonesia untuk menggunakan dana desa secara tepat sasaran serta sesuai kebutuhan agar dapat mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga alokasi dana desa yang sesuai menjadi sebuah kegiatan ekonomi atau usaha produktif yang memajukan dan mensejahterakan desa (Mandra, 2023).

Rohaeni (2015), berpendapat bahwa:

“Salah satu cara yang banyak digunakan oleh pemerintah negara dimanapun dalam mengatasi kemiskinan di negaranya adalah dengan memberikan perhatian khusus dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan yaitu dengan mengalokasikan sejumlah dana pada pospos yang dapat digunakan sebagai dana untuk membiayai program atau kebijakan yang dapat menanggulangi masalah kemiskinan tersebut”

Sebagai bagian dari upaya dalam mengatasi kemiskinan, saat ini pemerintah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu langkah konkrit dalam menangani masalah kemiskinan adalah melalui Alokasi Dana Desa (ADD), dimana salah satu tujuannya adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan Pasal 19 PP 60/2014 (dalam jdih.kemenkeu.go.id), pada prinsipnya ADD/Dana Desa dialokasikan APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan,

kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Perkembangan ADD Nias Utara dapat dilihat pada gambar 1.2.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Keuangan Pemerintahan Desa 2010-2023 (diolah)

Gambar 1.2 Perkembangan Alokasi Dana Desa Kabupaten Nias Utara Tahun 2010-2022

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Jumlah ADD Nias Utara untuk 5 tahun terakhir jika dibandingkan pada tahun 2012-2015 memiliki perbedaan yang cukup jauh. Tahun 2016 ADD Nias Utara meningkat pesat dibanding tahun 2015, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang meningkatkan anggaran Desa sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini sesuai dengan Kajian Analisis Ringkas Cepat Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, yang menyatakan bahwa ADD dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke setiap desa. Besaran ADD Nasional cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, ADD Nasional hanya sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata ADD Nasional sebesar Rp280 juta untuk setiap desa, jauh lebih besar dari tahun 2016.

Pada gambar 1.2, menjelaskan bahwa di tahun yang sama yakni 2012-2015, ADD Nias Utara mengikuti jumlah penduduk miskinnya di tahun itu. Namun, di tahun 2016-2020 ADD Nias

Utara terus naik dan begitupun dengan kondisi kemiskinan yang terus turun. Namun, cukup berbeda di tahun 2020 dimana tahun yang tidak bisa diprediksi dengan hadirnya wabah *Covid-19* di skala global dengan kondisi ADD Nias Utara yang terus naik, justru jumlah penduduk miskin di Nias Utara kembali naik, sampai dengan tahun 2021. Kemudian, ADD Nias Utara tahun 2022 kembali naik, namun kemiskinan di Nias Utara turun (tabel 1.1). Walaupun turun, namun masih terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Nias Utara tahun 2022 yakni sebanyak 150.780 Jiwa.

Gambar 1.2 di atas juga menunjukkan bahwa tren peningkatan ADD di Nias utara semakin meningkat dari tahun ke tahun dan melonjak tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015 kebelakang. Dari grafik tersebut diharapkan bahwa adanya perbaikan yang terjadi di berbagai sektor yang membuat Nias utara semakin membaik dalam perekonomiannya dalam setiap desa. Walaupun pemerintah telah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan dan mengelola ADD dengan sebaik mungkin untuk mengurangi kemiskinan di Nias Utara, kemiskinan masih cukup tinggi.

Pada tahun 2019, Desa Orahili, Kecamatan Namohalu esiya, Kabupaten Nias Utara menjadi salah satu desa yang menerima permasalahan terkait pendistribusian ADD di mana Kepala Desa Orahili diduga melakukan penyelewengan Alokasi Dana Desa/Dana Desa tahun anggaran 2018 sekitar Rp330 juta yang berdampak pada kondisi perekonomian di Desa Orahili (Zega, H., 2019). Dari masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa perlu diperbaiki dan bahwa ada hambatan yang muncul saat menggunakan dana ini untuk tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal faktor-faktor penyebab kemiskinan, menurut Kuncoro dalam penelitian Itang (2015), bahwa salah satu faktor penyebab dari kemiskinan adalah sumber daya manusia. Itu

artinya bahwa, kemiskinan terjadi ketika rendahnya kualitas daripada sumber daya manusia (SDM) dalam suatu daerah tersebut. Salah satu tolak ukur kualitas SDM dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pembangunan kualitas manusia mencerminkan peran yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan. IPM sebagai ukuran untuk kualitas pembangunan manusia, menjadi variabel yang sangat penting bagi suatu negara dalam upayanya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pembangunan manusia secara keseluruhan, yang mencakup aspek mental, fisik, dan kecerdasan, menjadi dasar utama kemajuan suatu bangsa menuju pembebasan dari kondisi kemiskinan.

Menurut BPS (2023,) IPM didasarkan pada tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM memberi pembuat kebijakan informasi yang penting untuk membuat kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, ada 4 komponen Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS, diantaranya : (1) Umur Harapan Hidup; (2) Harapan Lama Sekolah; (3) Rata-rata Lama Sekolah; (4) Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Dalam rentang tahun 2010-2023, perkembangan nilai-nilai IPM dan komponennya di Kabupaten Nias Utara mencerminkan perjalanan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. IPM di Nias Utara tahun 2010-2023 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Nias Utara tahun 2010-2023

Tahun	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran (Ribu Rupiah/Tahun)	IPM
2010	68.12	10.20	4.59	5236	54.72
2011	68.23	11.55	5.36	5411	57.53
2012	69.33	11.65	6.45	6125	57.87

2013	69.39	11.76	6.46	6159	58.29
2014	68.49	11.86	6.05	5580	59.18
2015	68.59	12.4	6.06	5627	59.88
2016	68.68	12.41	6.07	5770	60.23
2017	68.77	12.57	6.08	5835	60.57
2018	68.98	12.58	6.09	6041	61.08
2019	69.29	12.78	6.25	6245	61.98
2020	69.43	13.03	6.58	6064	62.36
2021	69.55	13.04	6.77	6155	62.82
2022	69.9	13.06	6.78	6575	63.75
2023	70,24	13.36	6.85	6788	64.64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara Dalam Angka 2010-2023 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kabupaten Nias Utara tahun 2012-2022 mengalami kemajuan dan hal ini seiring dengan empat aspek yang menjadi tolak ukur IPM di Nias Utara. IPM Kabupaten Nias Utara meningkat dari 57.87 di tahun 2012 menjadi 58.29 pada tahun 2013. Kemudian di tahun 2014 terus meningkat sampai dengan tahun 2017 menjadi 60.5. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi UHH, dimana tahun 2015 UHH mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yakni 68.59. Artinya bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Nias Utara pada tahun 2015 diharapkan dapat bertahan hidup sampai usia 67 sampai 69 tahun. Hal yang sama dengan kondisi HLS dimana pada tahun 2015, HLS hanya mencapai 12.4 tahun, yang artinya HLS anak berusia 7 tahun di Nias Utara berkisar antara 10 sampai 12 tahun saja. Begitupun kondisi RLS, dimana RLS tahun 2015 adalah 6.06 tahun yang artinya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nias Utara yang usianya 25 tahun ke atas rata-rata telah mendapatkan pendidikan selama 6 tahun. Hal ini menjadi sebuah perhatian khusus ketika mengacu pada program pemerintah yang memberikan regulasi wajib belajar

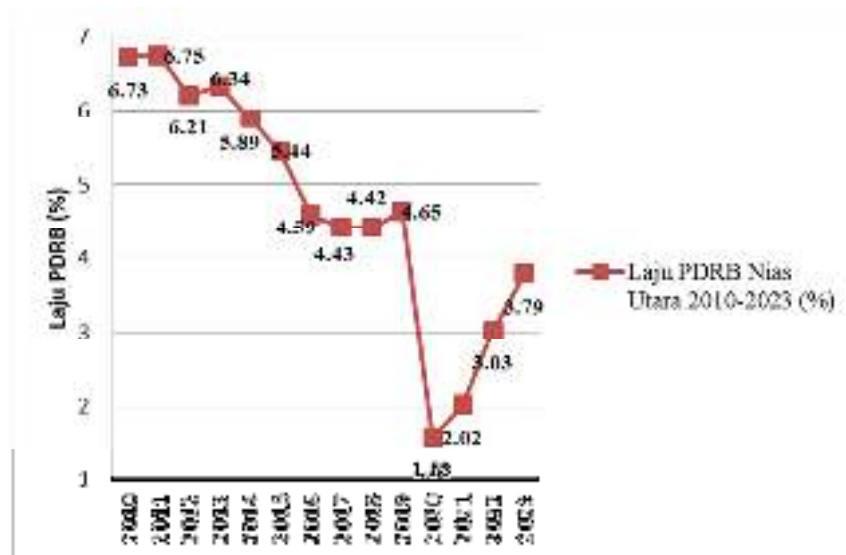
selama 9 tahun yang berlaku sejak 1994. Dan dapat dilihat berdasarkan data, bahwa rata-rata masyarakat Nias Utara hanya bisa mencapai 6 tahun sekolah di tahun 2015 dengan pengeluaran per kapita yang mengikuti yakni sebesar Rp.5.627.000/tahun atau setara dengan Rp.468.916/bulan. Dan ketika melihat kembali kondisi kemiskinan pada gambar 1.2 bahwa jumlah penduduk miskin cukup besar dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 4.374.000 jiwa.

Tren peningkatan terus terjadi dimana mulai tahun 2017-2022 IPM Nias Utara terus mengalami perkembangan yang baik, hingga pada tahun 2022, IPM Nias Utara mencapai 63.75. Dimana UHH nya sebesar 69.9 tahun, HLS nya sebesar 13.06 tahun yang artinya Harapan Lama Sekolah anak berusia 7 tahun di Nias Utara mampu mencapai 13 tahun dan hal ini berarti diharapkan anak-anak yang usia 7 tahun sudah mampu menempuh pendidikan tingkat diploma. Kemudian RLS nya mencapai 6.78 tahun artinya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nias Utara yang usianya 25 tahun ke atas rata-rata telah mendapatkan pendidikan antara 6 sampai 7 tahun atau sudah mencapai pendidikan menengah pertama tingkat awal. Seiring berkembangnya waktu, Nias Utara perlahan sudah mampu untuk keluar dari tantangan dalam meningkatkan kualitas SDM, dimana terbukti di tahun 2022 masyarakat Nias Utara sudah bisa mencapai 13 tahun untuk menikmati dunia pendidikan dan sudah lebih dari baik ketika mengacu pada peraturan pemerintah yang baru yakni di UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa salah satu program prioritas nasional adalah menuntaskan wajib belajar selama 12 tahun. Dan melihat kondisi kemiskinan tahun 2022, dalam gambar 1.2 cukup menjelaskan bahwa tren peningkatan IPM memberikan efek yang cukup baik bagi jumlah penduduk miskin yang turun menjadi 3.287.000 Jiwa. Kemudian, ketika melihat pengeluaran per kapita yakni mencapai Rp 6.575.000/tahun atau setara dengan Rp 547.916 /bulan, dan jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yakni sebesar Rp 2.522.610, maka adanya

perbedaan yang cukup jauh dan hal ini menjadi sebuah beban bagi pemerintah kabupaten untuk gencar dalam meningkatkannya.

Selain pembangunan manusia, keberhasilan perekonomian wilayah diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin baik kesejahteraan masyarakat (Khairul dalam Dondo, Benu, dan Manginsela, 2019). Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dalam pengentasan kemiskinan. Menurut teori trickle down effect, pertumbuhan ekonomi akan turun dari atas ke bawah, atau tingkat kenaikan pendapatan rill akan mengalir dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Jika pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat, itu akan lebih menguntungkan (Ardianto, T. 2012).



Sumber: Badan Pusat Statistik Nias Utara, Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2010-2023 (diolah)

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Nias Utara Harga Konstan tahun 2010-2023

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa pendapatan kabupaten Nias Utara terus mengalami penurunan dari tahun 2010-2019 hingga mencapai pada titik yang cukup ekstrim di tahun 2020. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6.21%, menandakan awal periode dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Namun, terjadi penurunan secara bertahap dalam laju pertumbuhan. Pada tahun 2015, terlihat penurunan yang cukup tajam dari 5.44% menjadi 4.59% pada tahun 2016. Tren penurunan ini berlanjut hingga 2018, di mana laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4.42%. Tahun 2019 mencatat peningkatan yang sedikit dengan laju pertumbuhan mencapai 4.65%. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup tinggi menjadi 1.58% dan hal ini dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* yang melanda sektor ekonomi global. Pada tahun 2021-2023, terlihat tanda-tanda pemulihan dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 2.02% dan 3.79%. Pengurangan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama pembangunan.

Nias Utara berada di urutan ketiga terendah setelah Nias Barat dan Nias Selatan dari Pendapatan per kapita Kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Tidak diragukan lagi, pendapatan perkapita yang rendah di kabupaten Nias Utara disebabkan oleh produktivitas yang rendah di berbagai industri, mulai dari pertanian hingga manufaktur dan jasa. Dan penyebab rendahnya pendapatan masyarakat di Nias utara adalah disebabkan oleh akses jalan atau infrastruktur yang sangat amat tidak layak untuk digunakan sebagai fasilitas untuk mendongkrak dan mendukung berbagai sektor dalam beroperasi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah kota Gunungsitoli, bahwa masalah infrastruktur yang tidak memadai adalah salah satu alasan rendahnya pendapatan masyarakat (Widyastuti, I., 2024). Oleh karena itu, salah satu alasan untuk melakukan penelitian ini adalah rendahnya pendapatan perkapita kabupaten Nias Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pendapatan perkapita kabupaten ini rendah dan bagaimana cara meningkatkannya di masa mendatang.

Dari uraian data diatas dapat kita lihat bahwa terjadinya fenomena dimana turunnya jumlah penduduk miskin tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini terlihat bahwa Kabupaten Nias Utara masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan grafik yang cukup baik. Dan relatif naiknya IPM masih tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan data diatas menunjukkan adanya fenomena menarik dimana kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun 2012- 2022, tetapi ADD dan IPM selalu mengalami peningkatan meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi.. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dengan ini penulis tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hubungan Kausalitas Kemiskinan Nias Utara dengan Alokasi Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia serta Produk Domestik Regional Bruto tahun 2010-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan kausalitas antara Alokasi Dana Desa dengan Kemiskinan di Kabupaten Nias Utara tahun 2010-2023?
2. Apakah ada hubungan kausalitas antara IPM dengan Kemiskinan di Kabupaten Nias Utara tahun 2010-2023?
3. Apakah ada hubungan kausalitas antara PDRB dengan Kemiskinan di Kabupaten Nias Utara tahun 2010-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah yang ada, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis ada tidaknya hubungan kausalitas antara ADD dengan Kemiskinan di Kabupaten Nias Utara tahun 2010-2023.
2. Untuk menganalisis ada tidaknya hubungan kausalitas antara IPM dengan Kemiskinan di Kabupaten Nias Utara tahun 2010-2023.
3. Untuk menganalisis ada tidaknya hubungan kausalitas antara PDRB dengan Kemiskinan di Kabupaten Nias Utara tahun 2010-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi guna menambah pengetahuan bagi para akademisi dan ilmu pengetahuan yang ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan variabel-variabel lain untuk melihat hubungan antara Alokasi Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto dan Kemiskinan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi kepada para pengambil kebijakan pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah serta instansi terkait

dalam menentukan langkah-langkah kebijakan dan pengelolaan anggaran yang tepat agar dapat meningkatkan Alokasi Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto serta mengurangi Jumlah kemiskinan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana hubungan kausal antara Alokasi Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto dan Kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Metode ini menggambarkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, bukan pengeluaran makanan. BAPPENAS mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dan layak. (BPS Nias Utara, 2023)

Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah kurangnya tempat berlindung. Kemiskinan adalah sakit dan tidak bisa berobat ke dokter (Bank Dunia, 2005). Menurut *Ghana Poverty Reduction Strategy* (GPRS) (dalam Addae-Korankye, A. 2014), kemiskinan dikenal sebagai kemiskinan multidimensi dengan hubungan interaktif dan kausal yang kompleks antar dimensi. Menurut SIDA (2005), masyarakat miskin seringkali kekurangan akses terhadap keuangan dan peluang memperoleh pendapatan.

Mollie Orshansky yang diakreditasi oleh pemerintah dalam pengembangan pengukuran kemiskinan di Amerika Serikat juga menyatakan bahwa kemiskinan adalah hilangnya kebutuhan dan kesenangan yang dianggap remeh oleh orang lain (Addae-Korankye, A. 2014).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo, ada empat jenis kemiskinan, Pertama adalah *persistent poverty* adalah kemiskinan yang kronis atau turun menurun, Kedua *Cyclical poverty* adalah yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan, Ketiga *seasonal poverty* adalah

kemiskinan musiman yang menimpa Nelayan dan Petani, Keempat accidental poverty adalah akibat bencana alam sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan (Mamun dan Fuadi, 2023).

Faisal Bahri (2002) menyatakan:

“Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu Negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar)”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan karena kemiskinan memiliki tolak ukur yang mencakup tidak hanya tingkat pendapatan yang rendah dan kekurangan pangan, tetapi juga tingkat kesehatan, pendidikan, dan perlakuan adil di muka bumi.

2.1.2 Teori Kemiskinan

Menurut Todaro dan Smith (2006:269), penduduk miskin biasanya tinggal di daerah pedesaan dan mencari uang melalui pertanian dan pekerjaan lain yang terkait dengan sektor ekonomi konvensional yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak daripada laki-laki dewasa, dan mereka biasanya terkonsentrasi di antara penduduk pribumi dan kelompok etnis minoritas.

Kuncoro mengatakan bahwa:

“Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kemiskinan juga muncul akibat perbedaan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas rendah sehingga upahnya rendah” (Kristanto, 2014).

Teori lingkaran setan kemiskinan, yang dibuat oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953, adalah salah satu teori kemiskinan yang paling terkenal. Menurut teori ini, semua komponen yang

menyebabkan kemiskinan berhubungan satu sama lain, sehingga kemiskinan tidak memiliki titik akhir atau dasar. Produksi yang rendah di daerah menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tidak berjalan dengan baik.



Gambar 2.1 Ilustrasi Lingkaran Kemiskinan Menurut Nurkse

Sumber : Nurske (1953) dalam Kuncoro, 2000

Nurkse berpendapat dalam teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan bahwa hambatan pembangunan di masa depan dan ketiadaan pembangunan masa lalu adalah dua faktor yang menyebabkan kemiskinan. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin” (*A country is poor because it is poor*). Dia berpendapat bahwa komponen utama dari lingkaran setan kemiskinan adalah kondisi yang menghalangi pembentukan modal yang tinggi. Tingkat tabungan menentukan pembentukan modal di satu sisi, dan perangsang untuk menanam modal menentukan pembentukan modal di sisi lain. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Oleh karena itu, dari segi penawaran modal dan permintaan modal, menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat.

Dalam penelitian Didu dan Fauzi (2016) menjelaskan tentang penawaran modal dan permintaan modal, bahwa aspek penawaran modal lingkaran setan kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut: tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah, yang pada gilirannya menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah. Keadaan yang terakhir ini selanjutnya akan dapat menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap rendah. Corak lingkaran setan kemiskinan bervariasi berdasarkan permintaan modal. Karena luas pasar untuk berbagai komoditas terbatas, yang telah disebutkan sebelumnya, penanaman modal rendah dipromosikan di negara-negara miskin. Sedangkan pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal. Nurkse, di sisi lain, berpendapat bahwa lingkaran perangkap kemiskinan yang disebutkan di atas bukan satu-satunya penghalang untuk peningkatan pembentukan modal. Efek demonstrasi internasional mengacu pada fenomena dimana contoh atau tindakan suatu negara dipengaruhi oleh tindakan atau contoh negara lain, terutama negara-negara maju atau berkembang dengan tingkat pembangunan yang tinggi.

Teori Kemiskinan yang dikemukakan oleh Shanon, Spicker, Cheyne, O'Brien dan Belgrave menyatakan bahwa kemiskinan adalah masalah yang terjadi pada seseorang yang disebabkan oleh kelemahan dan keputusan mereka sendiri. Apabila kekuatan pasar menjadi lebih kuat dan pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya, kemiskinan akan hilang dengan sendirinya. Teori ini berpendapat bahwa penanggulangan kemiskinan bersifat residual dan melibatkan keluarga, kelompok swadaya, dan lembaga keagamaan. Negara akan bertindak setelah lembaga-lembaga

ini tidak mampu menanggulangi kemiskinan. Program Jaminan Pengaman Sosial (JPS) adalah contoh bagaimana teori ini dapat diterapkan (Lumantari, 2019).

Selain itu, teori sosial demokrat menyatakan bahwa kemiskinan adalah masalah struktural daripada individu. Ketidakadilan dan ketimpangan yang disebabkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber-sumber modal adalah penyebab kemiskinan. Dalam memberikan pelayanan sosial dasar bagi seluruh masyarakat, teori ini menekankan betapa pentingnya manajemen negara dan pendanaan. Menurut teori ini, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat institusional melalui program-program jaminan sosial dan bantuan sosial (Lumantari, 2019).

Adapun teori pembangunan menyatakan bahwa akar permasalahan kemiskinan adalah persoalan perekonomian dan masyarakat sebagai satu kesatuan. Asumsi dari teori ini adalah: a) Negara menjadi miskin karena ketiadaan atribut industrialisasi, modal, kemampuan manajerial, dan prasarana yang diperlukan untuk peningkatan ekonomi. b) Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah ketimpangan. c) Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi didorong setinggi-tingginya. Dari asumsi tersebut disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan ekonomi dan pembangunan, bukan hanya persoalan budaya (Lumantari, 2019).

2.1.3 Indikator Dan Ukuran Kemiskinan

a. Indikator Kemiskinan

Bank Dunia (World Bank) memiliki indikator-indikator kemiskinan yang terdiri dari:

1. Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Pembangunan yang bias di kota
4. Perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat
5. Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi
6. Rendahnya produktivitas
7. Budaya hidup yang jelek
8. Tata pemerintahan yang buruk
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan

BPS (2023) menjelaskan bahwa berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada tiga indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu: Pertama, *Head Count Index (HCI-P0)*, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk

sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Berikut ini cara menghitung persentase penduduk miskin dengan rumus sebagai berikut (Satu Data Indonesia, 2023):

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \frac{[z-y_1]_0}{z} \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan :

P_0 = Persentase Penduduk Miskin

Z = Garis Kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah Penduduk

b. Ukuran Kemiskinan

Menurut Susanti (dalam Putra, 2019), garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut pandang konsumsi.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan (BPS Kabupaten Nias Utara, 2023).

Rumus Perhitungan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM \dots\dots\dots (2.2)}$$

Keterangan :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Purba, Tobing, Hutabarat (2014), menjelaskan bahwa kemiskinan dapat di bagi menjadi empat bentuk, yaitu :

1. Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan (*poverty line*) yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ini disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan.
3. Kemiskinan kultural adalah suatu konsep yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya.

4. Kemiskinan struktural adalah suatu konsep kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya. Kemiskinan ini terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

2.1.4 Penyebab Kemiskinan

Menurut Spicker (dalam Agustina, Syechalad dan Hamzah, 2018) penyebab kemiskinan dapat dibagi kedalam 4 Mazhab (aliran) yang berbeda, yaitu pertama, *Individual Explanation* adalah kemiskinan dalam terminologi karakteristik orang miskin itu sendiri, yaitu hasil dari kemalasan dan beberapa macam kekurangan atau kecacatan, miskin karena membuat kesalahan pilihan, memiliki anak pada waktu yang tidak tepat, gagal untuk bekerja dan sebagainya. Kedua, *Familial explanation* adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, dimana terdapat warisan pada generasi selanjutnya sehingga terjadi ketidakberuntungan yang berulang terus ke generasi selanjutnya, baik dalam warisan asuhan dan pendidikan. Ketiga, *Subcultural explanation* adalah kemiskinan karena pola perilaku, tapi lebih disebabkan oleh keadaan pada pilihan personal. Keempat, *Structural explanation* yaitu mengidentifikasi kemiskinan sebagai hasil dari masyarakat di tempat tersebut. Kemiskinan menciptakan suatu kesenjangan diinterpretasikan oleh adanya divisi sosial, kelas, status atau kekuatan.

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan (dalam Deny Tisna, 2008) penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi

masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Faktor lainnya adalah warga miskin tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Di masyarakat miskin, gizi buruk masih ada. Hal ini terutama disebabkan oleh cakupan perlindungan sosial yang kurang untuk komunitas miskin. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, bantuan kepada masyarakat rentan seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu, dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih kurang.

Faktor penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu (Nanga, M. et al. 2018):

- a. Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.
- b. Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
- c. Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.
- d. Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
- e. Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.

2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.2.1 Definisi dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Romantis, 2015).

Singkatnya, ADD yaitu suatu alokasi dana yang diambilkan dari 10 persen dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penyaluran ADD di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini sangat penting bagi pemerintahan desa dalam mendorong kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan fakta empiris membuktikan bahwa hampir sebagian besar pemerintah desa mengandalkan ADD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Gumilang, 2017).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, ADD dimasukkan untuk tujuan berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Lalira, Nakoko dan Rorong (2018), Peranan ADD menjadi tulang punggung dalam mengurangi kemiskinan dan juga dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sebab adanya dana-dana desa yang meningkat setiap tahunnya semestinya tingkat kemiskinan akan berkurang. Sebab Dana Desa tersebut dapat menciptakan tenaga kerja, memberikan peluang kerja yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat meningkatkan pembangunan desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat..

2.2.2 Teori Alokasi Dana Desa

a. Teori *Publik Finance*

Dalam pengelolaan keuangan negara berlaku prinsip *money follow function* maka besar kecilnya anggaran belanja negara tergantung pada banyak sedikitnya fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Richard Musgrave membagi fungsi dan kebijakan belanja pemerintah menjadi berikut tiga fungsi yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. **Fungsi alokasi** yaitu fungsi pemerintah dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan menyediakan kebutuhan masyarakat atas barang-barang publik secara efektif karena kelemahan-kelemahan yang

ditimbulkan oleh mekanisme pasar, misalnya kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan, keamanan, dan keadilan. Selanjutnya **fungsi distribusi** yaitu melalui kebijakan anggaran, pemerintah dapat menjalankan fungsi distribusi pendapatan dan menciptakan pemerataan pendapatan, misalnya melalui pengeluaran pemerintah yang bersifat transfer, agar kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial ekonomi tidak terlalu lebar yang bisa berimplikasi pada bidang-bidang lain. Terakhir, **fungsi stabilisasi** yaitu tugas pemerintah adalah menciptakan stabilitas perekonomian, dengan mempertahankan tingkat penggunaan faktor-faktor produksi dan stabilitas nilai uang, untuk mencapai stabilitas ekonomi tersebut pemerintah dapat melakukan kebijakan anggaran atau kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (Rahayu, 2021).

b. Kebijakan Fiskal

Teori ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan upaya (pengumpulan) pendapatan dan pengeluaran nasional (Mankiw, 2013). Kebijakan fiskal umumnya mewakili pilihan pemerintah dalam menentukan berapa banyak yang akan dibelanjakan dan berapa banyak pendapatan yang digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai opsi tersebut sebenarnya dilaksanakan melalui anggaran pemerintah provinsi yang ada yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena didorong oleh peningkatan produksi nasional yang didorong oleh pemerintah yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi masyarakat yang artinya terjadinya kesejahteraan dalam masyarakat.

c. Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*)

Terbatasnya sumber daya anggaran menjadi alasan perlunya kebijakan keuangan belanja publik yang efektif dan efisien. Kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan

pemerintah merupakan alat kebijakan fiskal untuk memajukan perekonomian sebagaimana dalam teori Keynes (Solikin dalam Iftitah dan Wibowo, 2022).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan salah satu komponen pembentuk permintaan agregat. Konsep pendapatan nasional berupa persamaan $Y = C + I + G + (X-M)$. Rostow Musgrave mengungkapkan bahwa belanja pemerintah pada tahap awal pembangunan bernilai lebih besar karena pembangunan cenderung berupa pembangunan fisik atau belanja modal (Aladejare dalam Iftitah dan Wibowo, 2022).

Hukum Wagner (*Wagner's Law*) menyatakan bahwa peran dan belanja pemerintah (*government expenditure*) akan semakin meningkat seiring semakin bertumbuhnya perekonomian di suatu wilayah (Sukartin & Saleh, 2012). Hal ini dimaksud bahwa peran belanja transfer pemerintah pusat melalui ADD/Dana Desa semakin meningkat tiap tahunnya seiring bertumbuhnya perekonomian di desa dan dengan begitu dapat menekan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

2.2.3 Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan ADD harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut (Fauzana, D.A., 2020) :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

3. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
3. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya (Somarak, A. 2014).

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.3.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang bisa pula menggambarkan perkembangan suatu pembangunan manusia secara terukur. IPM pertama kali diperkenalkan tepat pada tahun 1990 oleh United Nation Development Programme (UNDP).

Menurut UNDP, IPM memiliki tiga indikator pokok yang digunakan untuk mengukur implementasi status 16 pengembangan manusia melalui indikator sebagai berikut: (1) Umur panjang dan hidup sehat, indikator ini diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir. (2) Sistem pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan angka penduduk yang melek huruf (AMH) atau mengenyam pendidikan pada usia produktif 15 tahun keatas. (3) Selanjutnya standar hidup yang diukur dengan angka pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli, dalam IPM ini nilai indeks berada di kisaran antara 0-100 (Zain, 2022).

2.3.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS (2023), Komponen-komponen yang terdapat pada IPM adalah sebagai berikut :

1. Umur Harapan Hidup saat Lahir - *Life Expectancy* (e_0)

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

2. Rata-rata Lama Sekolah - *Mean Years of Schooling* (MYS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

3. Harapan Lama Sekolah - *Expected Years of Schooling* (EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai

jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan - *Purchasing power parity* (PPP)

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

2.3.3 Teori Indeks Pembangunan Manusia

2.3.3.1 Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia

Berikut teori-teori ekonomi sumber daya manusia yang muncul sejak zaman aliran klasik modern, yaitu:

a. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Adam Smith juga melihat bahwa alokasi SDM yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Alokasi SDM yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Malthus

Menurut Malthus, manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang menurut deret ukur (2,4,8,16,32, dst), sedangkan pertumbuhan produksi makanan meningkat hanya berdasarkan deret hitung (3, 4, 6, 8, 10, dst). Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi makanan, maka diramalkan akan terjadi malapetaka yang akan menimpa manusia dikemudian hari.

Pembangunan manusia yang dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (input) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang orientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan.

2.3.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Secara kontekstual, perkembangan IPM menunjukkan perubahan pilihan-pilihan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bernilai.

BPS (2022), secara umum manfaat IPM adalah sebagai berikut :

1. Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.4.1 Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB yang dihasilkan suatu daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Produk domestik merupakan semua barang dan jasa hasil dari ekonomi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki penduduk didaerah tersebut. Sedangkan produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah maupun luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang di bayarkan ke luar daerah

maupun luar negeri tersebut. Jadi produk regional adalah produk yang dihasilkan karena faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah (BPS Kabupaten Boyolali, 2023).

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. (BPS Nias Utara, 2022).

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini menggunakan Tahun Dasar 2010 dan dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (kategori) yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi

11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya. Setiap kategori tersebut di rinci lagi menjadi sub-sub kategori.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba pengeluaran konsumsi pemerintah pembentukan modal tetap domestik bruto perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan

cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

PDRB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan.

- a. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.

2.4.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Harrod-Dommar

Teori pertumbuhan Harrod Dommar dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi sesudah Keynes, yaitu Evsey Domar dan R. F. Harrod. Harrod Dommar membangun model pertumbuhan berdasarkan pada teori keseimbangan kegiatan perekonomian yang dikemukakan oleh Keynes. Keynes menyatakan bahwa pembelanjaan agregat akan menentukan kegiatan tingkat kegiatan ekonomi, yaitu di dalam perekonomian terdapat konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan di mana kedua faktor tersebut menentukan tingkat pendapatan nasional. Harrod Domar kemudian menyatakan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi

baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal. (Ginting, A.M dan Rasbin, 2010).

b. Teori pertumbuhan Neo Klasik

Model pertumbuhan neoklasik Solow merupakan pilar yang sangat memberikan kontribusi terhadap teori pertumbuhan neoklasik. Model pertumbuhan Solow ini berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah. Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow diasumsikan bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi faktor-faktor lain. Menurut teori pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor, yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi.

2.5 Hubungan Teoritis Antar Variabel Penelitian

2.5.1 Hubungan Alokasi Dana Desa dengan Kemiskinan

Salah satu tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah mengatasi masalah kemiskinan. Berdasarkan teori dari kebijakan Pengeluaran Pemerintah, bahwa *Government Expenditure* akan semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pemerintah meningkatkan belanja pemerintah melalui ADD di sebuah daerah maka hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah tersebut tumbuh dan kemudian berpengaruh kepada penurunan tingkat kemiskinan akibat dari tumbuhnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan naiknya pola konsumsi masyarakat atau paritas daya beli masyarakat.

Namun, ada dua faktor permasalahan yang menyebabkan ADD tidak mampu mempengaruhi secara langsung kepada Kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada dua jenis masyarakat, dimana ada Masyarakat yang menikmati atau merasakan dampak dari Adanya Alokasi Dana Desa dan sebaliknya ada masyarakat yang tidak menikmati. Masyarakat yang menikmati atau ADD yang tepat sasaran akan memberikan dampak kepada kemiskinan secara baik, hal ini dapat dilihat pada pengaruhnya terhadap berbagai program yang diberikan oleh pemerintah daerah ataupun desa lewat dana ADD untuk memberdayakan masyarakat sehingga oleh karena adanya pemberdayaan tersebut masyarakat jauh lebih produktif dan sejahtera dan menekan turunnya jumlah penduduk miskin. Hal ini lebih lanjut ditegaskan dengan pernyataan Azzahra, et.al (2022) yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya peningkatan penyaluran ADD mampu meningkatkan perekonomian daerah dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah, yaitu antara lain mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolak ukur kemandirian daerah. Peningkatan penyaluran anggaran ADD juga mampu meningkatkan total pengeluaran daerah untuk mendorong peningkatan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) daerah. Selanjutnya peningkatan penyaluran Alokasi Dana Desa juga harus mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan di perdesaan”.

Namun, untuk yang tidak bisa menikmati atau ADD yang tidak tepat sasaran akan semakin bertahan pada posisi sebagai masyarakat yang membutuhkan perkembangan dari pemerintah dan dinilai mengkhawatirkan karena tidak diberikan wadah pemberdayaan untuk menjadikan masyarakat semakin produktif dan sejahtera, sehingga masyarakat yang tidak menerima dampak dari ADD ini akan semakin hidup dalam ketidaksejahteraan yang membuat angka kemiskinan semakin naik.

Hal ini lebih lanjut di jelaskan pada penelitian Matias, dkk (dalam Ula, dkk, 2021) yang berpendapat bahwa kebijakan publik yang berkelanjutan adalah modal penting dan dalam mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik. Pun, Yu, dkk (dalam Ula, dkk, 2021),

mengemukakan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah untuk ketahanan sosial merupakan kebijakan yang sangat efektif dalam mengatasi kemiskinan. Sebaliknya, Anderson, dkk (dalam Ula, dkk, 2021) tidak menemukan bukti yang jelas bahwa belanja pemerintah yang lebih tinggi telah berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

2.5.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan

Teori lingkaran kemiskinan yang menekankan bahwa kemiskinan menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk di tembus. Contohnya rendahnya pendapatan dapat mengakibatkan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas dan peluang ekonomi, sehingga mempertahankan kemiskinan secara permanen. IPM yang diukur melalui UHH,RLS dan HLS serta pengeluaran per kapita yang rendah melahirkan sumber daya manusia dengan kualitas yang rendah sehingga tidak mampu berdaya saing untuk mendapatkan kesejahteraan yang ditandai dengan kemampuan seseorang membeli barang/jasa untuk dikonsumsi. Sehingga pada saat rendahnya daya beli seseorang maka hal itu menunjukkan kondisi kemiskinan. Dan seperti teori Klasik Adam Smith menyatakan bahwa Alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Sukmaraga dalam Nababan (2020) menyatakan bahwa :

“Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin”.

2.5.3 Hubungan Produk Domestik Regional dengan Kemiskinan

Dalam teori ekonomi makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur melalui PDRB. Semakin tinggi PDRB per kapita, maka semakin meningkatkan kesejahteraan penduduk. Agar PDRB per kapita terus meningkat, maka perekonomian harus terus bertumbuh dan harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Ketika penduduk di suatu daerah sejahtera maka akan mengurangi tingkat kemiskinan suatu daerah tersebut (Rahardja dalam Permatasari, 2019).

Dalam perjalanannya, ada dua tipe masyarakat yang menyebabkan kemiskinan bisa naik dan turun dari pengaruh PDRB. Yang pertama adalah Masyarakat yang menikmati dengan adanya progress yang baik pada PDRB daerahnya. Masyarakat yang menikmati dampak dari PDRB akan memberikan dampak baik bagi kondisi perekonomian dan pembangunan daerah, dimana dapat menurunkan jumlah ataupun tingkat kemiskinan daerah sehingga dalam hal ini akan berdampak pada pengeluaran pemerintah yang semakin naik, setelah pengeluaran pemerintah naik, secara otomatis permintaan dalam masyarakat juga naik dan berdampak pada peningkatan investasi yang terus naik. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan PDRB dalam daerah tersebut. Yang kedua adalah masyarakat yang tidak menikmati dengan pertumbuhan dari PDRB daerah tersebut. Masyarakat yang tidak menikmati akan memberikan dampak yang berlawanan dibanding dengan masyarakat yang menikmati. Yang tidak menikmati akan berdampak pada peningkatan kemiskinan, kemudian pengeluaran pemerintah jadi turun. Permintaan akan barang dan jasa juga turun, serta daya tarik investasi juga terus turun, sehingga pertumbuhan PDRB dalam hal ini juga tidak dapat mendorong dampak baik kepada masalah kemiskinan.

Sejalan dengan Teori perpotongan Keynesian yang menjelaskan kenaikan belanja pemerintah mendorong adanya kenaikan dalam pendapatan yang lebih besar, teori tersebut disebut

penggandaan belanja pemerintah (*government-purchases multiplier*). Pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika belanja pemerintah meningkatkan pendapatan maka meningkatkan juga konsumsi, dan seterusnya. Karena itu, dalam kenaikan belanja pemerintah menyebabkan kenaikan pendapatan yang lebih besar. Artinya secara tidak langsung, kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal melalui salah satu instrumennya yaitu belanja daerah dapat mengurangi kemiskinan.

Susilowati, et. al. (2017) menyatakan bahwa:

“Proses lajunya perekonomian suatu daerah ditujukan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDRB. Semakin tinggi PDRB pada suatu daerah maka semakin besar potensi sumber penerimaan dan apabila PDRB pada suatu daerah rendah maka akan berpengaruh terhadap kemiskinan.”

2.6 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Akbar dan Prabowo (2023)	Hubungan Kausalitas Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Di Indonesia	Pendekatan Kuantitatif Dan Metode Kausalitas Granger	Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Terdapat Kausalitas Satu Arah Antara IPM Dan Kemiskinan, Terdapat Kausalitas Dua Arah Antara IPM Dan PDRB, Serta Terdapat Kausalitas Dua Arah Antara Kemiskinan Dan PDRB.
2.	Sukma dan Puspitasari (2023)	Analisis Kausalitas Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar	Uji Kausalitas Granger	Hasil Uji Kausalitas Granger Menyatakan Bahwa Terdapat Hubungan Kausalitas Satu Arah Antara Tingkat Kesejahteraan Mempengaruhi Dana Desa Dan Kausalitas Dua Arah Antara Dana Desa Menyebabkan Atau Mempengaruhi Infrastruktur Dan Begitu Pula Sebaliknya.
3.	Adriani dan Ariusni (2020)	Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pendidikan Dan Distribusi Pendapatan Di Pulau Sumatera	Analisi Panel Vector Regression, Dan Uji Kausalitas Granger	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa 1. Tidak Terdapat Hubungan Kausalitas Maupun Satu Arah Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Di Pulau Sumatera. 2. Tidak Terdapat Hubungan Kausalitas Antara Kemiskinan Dengan Distribusi Pendapatan Di Pulau Sumatera, Namun Terdapat Hubungan Satu Arah

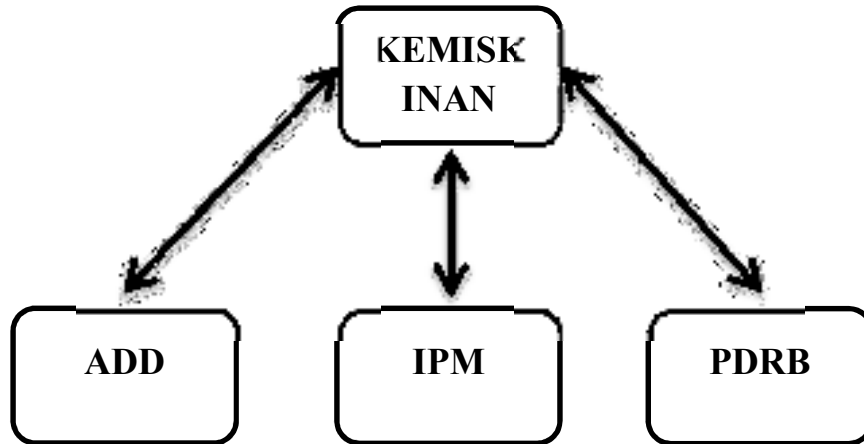
				<p>Antara Kemiskinan Terhadap Distribusi Pendapatan.</p> <p>3. Tidak Terdapat Hubungan Kausalita Maupun Hubungan Satu Arah Antara Distribusi Pendapatan Dengan Pendidikan Di Pulau Sumatera.</p> <p>4. Tidak Terdapat Hubungan Kausalitas Antara Pendidikan Dengan Pertumbuhan Ekonomi, Namun Terdapat Hubungan Satu Arah Antara Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Sumatera.</p> <p>5. Tidak Terdapat Hubungan Kausalitas Maupun Satu Arah Antara Pertumbuhan Dengan Distribusi Pendapatan Di Pulau Sumatera.</p> <p>6. Tidak Terdapat Hubungan Kausalitas Antara Pendidikan Dengan Kemiskinan , Namun Terdapat Hubungan Satu Arah Kemiskinan Terhadap Pendidikan Di Pulau Sumatera.</p>
4.	Lestari (2016)	Analisis Hubungan Kointegrasi Dan Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara	Uji Kointegrasi Dan Uji <i>Causality Granger</i>	Uji Kointegrasi Menunjukkan Bahwa Pengeluaran Pemerintah Dan Kemiskinan Di Sumatera Utara Mempunyai Hubungan Yang Konsisten Dalam Jangka Panjang. Dan Uji Kausalitas Granger Menunjukkan Tidak Ada Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Dengan Kemiskinan Di Sumatera

				Utara.
5.	Susilowati dan Suliswanto (2015)	Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan(Kajian Teoritis Di Indonesia)	Granger Causality	Hasil Uji Kausalitas Menunjukkan Tidak Ada Hubungan Kausal Antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Utang Luar Negeri (AD), Uji Kausalitas Kedua Menunjukkan Bahwa Hubungan Kausal Satu Arah Antara Utang Luar Negeri (AD) Ke Kemiskinan. Uji Kausalitas Ketiga Menunjukkan Bahwa Satu Arah Hubungan Kausal Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Utang Luar Negeri (AD), Uji Kausalitas Keempat Menunjukkan Bahwa, Tidak Ada Hubungan Kausal Antara Kemiskinan Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Uji Kausalitas Kelima Tidak Menunjukkan Hubungan Sebab Akibat Terjadi Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Uji Kausalitas Keenam Yang Menunjukkan Satu Arah Hubungan Kausal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan.
6.	Arirah (2020)	Pengaruh PDRB, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Maros.	Regresi Linear Berganda	Variabel PDRB Dan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Maros Dengan Nilai Masing-Masing 0,012 Untuk PDRB, 0,032 Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Sementara Dana Desa Dengan

				<p>Nilai 0,665 Yang Menunjukkan Tidak Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Maros. Sedangkan Nilai Koefisien Determinasi (R^2) Adalah 0,998 Atau 99,8%. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Kemampuan PDRB, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Dalam Menjelaskan Kemiskinan Adalah Sebesar 99,8%.</p>
7.	Azzahra, Riani & Mafruhah (2022)	Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 34 Provinsi – Indonesia Pada Tahun 2015-2020	Analisis Data Panel Dengan Pendekatan Fixed Effect Model (FEM)	<p>Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Per Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2015-2020. 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Per Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2015-2020.
8.	Gumilang (2017)	Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bogor	Analisis Deskriptif Dan Model Ekonometrik Data Panel	Hasil Analisis Ekonometrik Menunjukkan Bahwa ADD Per Kapita, IPM, PDRB Sektor Industri Berpengaruh Signifikan Dan Negatif Terhadap Kemiskinan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis merupakan pola pikir teori yang didasarkan pada teori yang dibahas dan dikaitkan dengan beberapa hasil dari penelitian terdahulu. Untuk memperjelas pemikiran dalam penelitian ini, skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang pada dasar kebenarannya harus diuji berdasarkan data yang terkumpul. Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka pemikiran dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga terdapat hubungan kausalitas antara ADD dengan Kemiskinan di Nias Utara tahun 2010-2023
2. Diduga terdapat hubungan kausalitas antara IPM dengan Kemiskinan di Nias Utara tahun 2010-2023
3. Diduga terdapat hubungan kausalitas antara PDRB dengan Kemiskinan di Nias Utara tahun 2010-2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nias Utara, pendekatan yang digunakan adalah dengan menganalisis bagaimana hubungan kausal antara Alokasi Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Nias Utara tahun 2010-2023.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Alokasi Dana Desa Kabupaten Nias Utara tahun 2010-2023.
2. Data IPM Kabupaten Nias Utara tahun 2010-2023.
3. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nias Utara tahun 2010-2023.
4. Data Jumlah Penduduk Miskin Nias Utara tahun 2010-2023.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data data berkala (*time series*) untuk periode 2010-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

3.3 Metode Analisis

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka metode analisis yang digunakan ialah menggunakan uji kausalitas. Dalam ilmu ekonometrika, uji kausalitas termasuk kedalam analisis regresi model dinamis karena memasukkan unsur *lag* didalam model dan biasanya penentuan hubungan antar variabel berdasarkan landasan teori atau kepustakaan (Gujarati, 2012).

Adapun tahapan dalam pengujiannya adalah sebagai berikut:

3.3.1 Uji Stasioner (*Unit Root Test*)

Uji Stasioneritas merupakan pengujian untuk mengetahui data yang diolah tidak dipengaruhi oleh waktu atau bergerak tidak stabil. Data *time series* dapat dinilai stasioner ketika data yang diolah bergerak stabil tanpa mengalami gejolak kepada tren ke arah negatif maupun positif (Gujarati, 1995). Apabila data yang diolah tidak stasioner maka peneliti akan kesulitan mengestimasi sebuah model. Data yang belum stasioner pada tingkat level maka dapat diidentifikasi melalui pengecekan *first difference* data tersebut. Apabila data yang akan diteliti belum stasioner maka harus dilakukan *second difference* dan seterusnya sampai data dinyatakan stasioner (Ajija, 2011). Jika di dalam pengujian tersebut ternyata data sudah stasioner, maka pengujian dapat dilanjutkan ke *Granger Causality test* pada data asli. Tapi jika salah satu variabel ada yang tidak stasioner, maka akan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah kedua variabel terkointegrasi atau tidak. Jika kedua variabel terkointegrasi, maka dapat langsung dilakukan *Granger Causality test* pada data asli. Tetapi tidak terkointegrasi, maka data yang tidak stasioner akan distasionerkan pada derajat 1 (*first difference*) baru dilanjutkan dengan *Granger Causality test* terhadap data yang stasioner.

Gujarati (dalam Sari, Winarni dan Amali, 2021) menjelaskan bentuk persamaan uji stasioner dengan analisis *Augmented Dickey Fuller* (ADF) dalam persamaan berikut:

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \alpha_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana :

Y_t = Bentuk dari first difference;

β_1 = intercept;

p = panjang lag yang digunakan dalam model;

ε = error term;

Ketentuan Uji ADF:

1. Jika Nilai ADF stat < Nilai *MacKinnon Critical* : H0 diterima (Nonstasioner)
2. Jika Nilai ADF stat > Nilai *MacKinnon Critical* : HA diterima (Stasioner)

Pengambilan keputusan:

- Membandingkan nilai mutlak t-ADF dengan nilai mutlak *MacKinnon Critical Values*.
- Jika nilai mutlak t-ADF lebih besar dari nilai mutlak *MacKinnon Critical Values*, maka data dianggap stasioner pada taraf nyata yang ditentukan.
- Jika nilai probabilitas kurang dari $\alpha=5\%$, maka data dianggap stasioner.
- Jika data tidak stasioner pada tingkat signifikansi yang ditentukan, dilakukan *differencing data* untuk memperoleh data yang stasioner pada derajat yang sama di *first difference*.

- Jika data sudah stasioner setelah *differencing*, pengujian dapat dilanjutkan ke *Granger Causality test* pada data asli.

3.3.2 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya hubungan jangka panjang antar variabel. Pengujian kointegrasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Johansen's cointegration test*. Pengujian kointegrasi perlu dilakukan untuk menghindari fenomena regresi palsu atau lancung dan sebagai pelengkap dari pengujian stasioneritas. Untuk menentukan data tersebut terkointegrasi atau tidak, dapat dilihat dengan membandingkan nilai *trace*-nya. Jika nilai *trace*-nya lebih besar dari nilai kritis 5% maka data terkointegrasi dan mempunyai pengaruh jangka panjang.

Prosesnya pengujian sebagai berikut:

Hipotesis :

- H_0 = Tidak terdapat hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen.
- H_1 = Terdapat hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen.

Kriteria :

1. Jika nilai *trace statistic* > nilai *critical value* maka H_0 ditolak
2. Jika nilai *trace statistic* < nilai *critical value* maka H_0 diterima

3.3.3 Penentuan *Lag* Optimal

Panjang kelambanan (*lag*) dikatakan optimal jika nilai-nilai pada kriteria tersebut memiliki nilai absolut paling kecil. Panjangnya kelambanan variabel yang optimal diperlukan untuk menangkap pengaruh dari setiap variabel yang lain dalam sistem VAR. Jika *lag* yang digunakan terlalu kecil maka kurang mampu untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Begitu juga sebaliknya, jika *lag* yang digunakan terlalu besar maka akan timbul ketidakefisienan dalam menerangkan sebuah hubungan. Penentuan *lag* optimum dalam penelitian ini menggunakan nilai dari LR, FPE, AIC, SC dan HQ terkecil.

Dalam penelitian ini penentuan *lag* optimal dicari melalui *Schwarz Information Criterion* (SIC) dengan pertimbangan (Sani, 2012) :

- a. SIC konsisten dalam pemilihan *lag* untuk menentukan model dibandingkan dengan AIC, dimana semakin besar jumlah sampel dalam model, probabilitas pemilihan *lag* yang sesuai dalam model semakin mengerucut ke SIC. Disisi lain pemilihan *lag* melalui AIC tidak konsisten terhadap jumlah sampel yang digunakan dalam model.
- b. SIC berguna untuk pengujian *lag* pada *in sample* dan *out sample data forecasting*, dimana *in sample forecasting* memberikan gambaran bagaimana model yang terpilih sesuai dengan data yang ada pada model penelitian. *Out sample forecasting* menggambarkan bagaimana model yang sesuai mampu memberikan ramalan nilai *regressor* akibat perubahan nilai regresi dimasa mendatang.

Formulasi SIC dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$SIC = -2 \frac{1}{T} + k \frac{\log T}{T} \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana :

$1 = \text{Sum of Squared Residual}$

$T = \text{Jumlah Observasi}$

$K = \text{Parameter yang diestimasi}$

3.3.4 Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas granger adalah uji hipotesis statistik untuk menentukan apakah satu rangkaian waktu berguna dalam memperkirakan yang lain (Granger, 1969). Gujarati dan Porter (dalam Akbar, 2023) menyatakan kausalitas granger merupakan uji yang berfungsi menunjukkan hubungan kausalitas atau timbal balik antara dua variabel penelitian yang menghasilkan apakah kedua variabel tersebut secara statistik saling mempengaruhi (hubungan dua arah atau timbal balik), memiliki hubungan searah atau sama sekali tidak ada hubungan (tidak saling mempengaruhi). Memastikan ada atau tidak variabel x dan y hubungan timbal balik.

Model persamaan kausalitas Granger dalam penelitian ini dapat diturunkan sebagai berikut :

$$ADD_t = \sum_{i=1}^n \alpha_i ADD_{t-i} + \sum_{i=1}^n \hat{\theta}_1 POV_{t-i} + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (3.5)$$

$$IPM = \sum_{i=1}^n \delta_i IPM_{t-i} + \sum_{i=1}^n \omega POV_{t-i} + \varepsilon_2 \dots \dots \dots (3.6)$$

$$PDRB = \sum_{i=1}^n \varphi_i PDRB_{t-i} + \sum_{i=1}^n \hat{\mu}_1 POV_{t-i} + \varepsilon_3 \dots \dots \dots (3.7)$$

Dimana :

$ADD = \text{Variabel Alokasi Dana Desa}$

IPM = Variabel Indeks Pembangunan Manusia

PDRB = Variabel Produk Domestik Regional Bruto

POV = Variabel Kemiskinan

t = seri waktu dari 1, 2,...n

ε = error term

Kausalitas adalah hubungan dua arah. Dengan demikian, jika terjadi kausalitas dalam model ekonometrika maka tidak terdapat variabel independen, semua variabel merupakan variabel dependen. Ada atau tidaknya kausalitas diuji melalui uji F atau dapat dilihat dari probabilitasnya (Widarjono, 2010).

Untuk melihat kausalitas granger dapat dilihat dengan membandingkan F-statistik dengan nilai kritis F-tabel pada tingkat kepercayaan (1%, 5% atau 10%) dan dapat dilihat dari membandingkan nilai probabilitasnya dengan tingkat kepercayaan (1%, 5% atau 10%). Jika seluruh variabel memiliki nilai F-statistik lebih besar dari nilai F tabel pada tingkat signifikan, maka kedua variabel tersebut memiliki kausalitas dua arah. Kriteria penolakan dan penerimaan:

- $F\text{-Stat} > F\text{-Tabel} = H_0$ ditolak
- $F\text{-Stat} < F\text{-Tabel} = H_0$ diterima

H_0 ditolak = Terdapat hubungan kausalitas antara ADD, IPM serta PDRB dengan Kemiskinan

H0 diterima = Tidak terdapat hubungan kausalitas antara ADD, IPM serta PDRB dengan Kemiskinan

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi standar minimum kebutuhan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Data yang digunakan adalah Jumlah Kemiskinan dalam Ribu Jiwa.

2. Alokasi Dana Desa

ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa dinyatakan dalam Miliar Rupiah.

3. Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah indeks yang digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui kualitas penduduk atau sumber daya manusia di dalam suatu negara dengan memperhatikan tiga aspek yaitu aspek kelangsungan hidup, aspek pengetahuan, dan aspek daya beli masyarakat.

4. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam Miliar Rupiah.

